

**FOCUS**



**Ahlan wa Sahlan 'King Salman'**

**HARI** ini media Indonesia diramaikan dengan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saudi ke Indonesia. Indonesia memiliki posisi khusus di mata Arab Saudi. Selain karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar juga anggota G20 bersama Arab Saudi dan Turki. Maka peristiwa langka ini layak dijadikan kunjungan diplomatik super penting, terkait peningkatan hubungan kedua negara, baik secara politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan.



**CATUR WASKITO EDY**  
WARTAWAN TRIBUN JATENG

Kunjungan ini tentu sangat spesial bagi Indonesia karena ini merupakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam 47 tahun terakhir ini. Banyak pihak berharap ini bisa membawa misi diplomasi ekonomi yang sangat positif bagi Indonesia.

Apalagi saat ini hubungan yang kurang hangat Timur Tengah dengan negara-negara Barat, ditambah kebijakan diskriminatif AS terhadap negara Timur Tengah. Hal itulah yang menjadi alasan Arab Saudi agresif melakukan pendekatan investasi ke China, Jepang, Malaysia, dan juga Indonesia. Maka diharapkan Indonesia mampu menangkap peluang ini untuk kepentingan nasional kita.

Saking pentingnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon sangat berharap agar momentum kunjungan Raja Salman ini benar-benar dioptimalkan pemerintah Indonesia untuk mendetailkan semua agenda kerjasama ekonomi yang akan dijalin. Jangan sampai berakhir seremonial saja.

Salah satu kesepakatannya membahas mengenai radikalisme yang ada di Indonesia dan terkait masalah haji. Diharapkan Menag tidak lupa menagih janji pada korban musibah crane asal Indonesia pada 2015 lalu.

Selain masalah haji, Ketua DPR RI Setya Novanto pun berharap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi bisa mendapat perlindungan agar mereka diberikan keamanan dan kenyamanan.

Dikabarkan rombongan jumbo Raja Saudi ini, disebut-sebut membawa iming-iming janji investasi senilai US\$ 25 miliar atau sekitar Rp 333 triliun (kurs US\$ 1=Rp 13.350). Investasi ini dijanjikan masuk kilang minyak dan gas bumi, pariwisata dan sebagainya. Mudah-mudahan janji tersebut bisa terealisasi. Maklum, sepanjang sejarahnya, nyaris tak terdengar investasi besar Arab Saudi di Indonesia.

Lima tahun terakhir, nilai tertinggi investasi pemodal negeri Petro Dollar itu tercapai tahun 2015, yakni US\$ 30,4 juta yang masuk ke industri kimia dasar, farmasi, hotel dan restoran dan perdagangan. Jika dihitung periode 2012-2016, realisasinya US\$ 34,6 juta ujar Tamba Hutapea, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Senin (27/2/2017).

Merujuk data BKPM, realisasi investasi Arab Saudi selama 2016 hanya US\$ 900.000 atau Rp 11,7 miliar. Tahun lalu, nilai investasi Arab Saudi di Indonesia berada di urutan 57, bahkan di bawah Mali yang berinvestasi US\$ 1,1 juta. Selama ini, investasi Arab Saudi ke Indonesia di urutan huncut yakni ke 36. Ini masih

**Opini**

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: [opini.tribun.jateng@gmail.com](mailto:opini.tribun.jateng@gmail.com), belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

# Sertifikasi Tanah Bondo Deso

**PEMERINTAH** Desa (Pendes) Buko, Wedung, Demak, sibuk menertibkan tanah *bondo deso*. Di samping menghindari sengketa, sertifikasi 25 bidang tanah milik desa juga dimaksudkan sebagai sarana tertib administrasi. Mereka ingin mendukung upaya Pemkab Demak dalam meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2017.

Langkah ini ditempuh setelah pamong melihat kenyataan bahwa banyak pihak kurang memiliki kepedulian terhadap status tanah *bondo deso*. Setelah pamong melelang dan melepaskannya ke masyarakat, seringkali luas tanah desa tersebut berubah, bahkan menyusut. Terjadi kecerobohan penggarap saat melakukan proses pengolahan.

Fakta di atas menandakan munculnya kesadaran pamong untuk melindungi aset desa. Mereka berharap pemasukan yang mengalir ke desa berjalan sebagaimana mestinya agar pembangunan senantiasa terlaksana. Bagaimanapun, kesejahteraan orang desa salah satunya ditopang oleh terpeliharanya tanah *bondo deso*. Rupiah yang dihasilkan darinya bisa dimanfaatkan untuk mengolah sumber daya alam, mengembangkan potensi lokal, serta memberdayakan masyarakat perdesaan.

Globalisasi menuntut orang-orang desa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mereka dihadapkan pada realitas dengan ciri dan karakteristik yang berbeda dengan masa silam. Apabila tetap terkungkung dalam alam tradisional, tentu mereka akan dilindas oleh roda waktu. Saat arus modernitas tak mampu dibendung, sertifikasi tanah *bondo deso* merupakan keniscayaan.

Konvensi dalam masyarakat perdesaan tidak selamanya didasarkan pada kepercayaan, melainkan juga mekanisme "hitam di atas putih". Dalam beberapa aspek, pemikiran masyarakat mulai bergeser. Pola pikir lapuk ditinggalkan dan tergantikan oleh pemikiran progresif. Futurisme membimbing mereka dalam bersikap, berperilaku, serta mengambil keputusan. Mereka tidak lagi terikat pada kondisi lampau, tetapi mulai mengarahkan perhatian pada kehidupan masa depan. Tak heran jika akhir-akhir ini terdapat kecenderungan bahwa mereka menghendaki kepastian hu-

kum, terutama menyangkut kepentingan publik.

**Secuplik Sejarah**

Keberadaan tanah *bondo deso* tidak terlepas dari eksistensi tanah komunal. Berdasarkan catatan D.H. Burger, pada tahun 1929, pamong desa mulai kepala desa, carik, kamitua, kebayon, kepetengan, hingga modin memperoleh tanah komunal. Pada tahun-tahun berikutnya, sawah komunal yang kurang terurus berubah bentuk menjadi sawah *bondo deso*, suatu



**RIZA MULTAZAM LUTHFY**  
PENELITI DESA, MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UII YOGYAKARTA

lembaga modern yang setiap tahun disewakan bagi keuntungan kas desa (S.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, 2008: 108).

Di wilayah perdesaan, hak garap atas tanah komunal mengacu pada dua sumber, yaitu pemberian dan pelepasan. Tanah komunal yang diberikan kepada warga biasanya disebut *norowito, gogolan, pekulen, playangan, kesikepan*, dan sejenisnya. Sedangkan tanah-tanah yang memperoleh hak garap berdasarkan pelepasan umumnya dinamakan *titisara, bondo deso* atau *kas desa*.

Para warga yang berhak

menerima hak garap berdasarkan pemberian (redistribusi) adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan berikut: telah berumah tangga, mempunyai rumah dan pekarangan, serta mengikuti kerja wajib desa. Terhadap tanah *titisara, bondo deso*, dan *kas desa*, setiap warga mengantongi peluang untuk mendapatkan hak garapnya melalui suatu pelelangan. Pemegang hak garap wajib membayar sejumlah uang yang akan dimanfaatkan bagi keperluan pemeliharaan desa, semisal perbaikan jembatan, pelebaran jalan, renovasi masjid, dan sebagainya (Ilyas Ismail, 2011: 143).

**Kepemilikan Aset**

Sertifikasi tanah *bondo deso* di Buko, Wedung, menjadi contoh sekaligus *pilot project* bagi desa-desa lainnya. Hal ini dikarenakan, di beberapa tempat, masih banyak aset desa yang terbengkalai sehingga rentan memancing konflik dan problematika sosial. Dalam taraf tertentu, situasi demikian kerap merugikan desa.

Merosotnya kekayaan desa antara lain disebabkan berkurangnya aset. Hak desa digrogoti oleh pihak tak bertanggung jawab yang memaksakan kepentingan pribadi. Tergerusnya nilai-nilai komunal oleh nilai-nilai individual menjadikan sebagian orang mudah mengor-

bankan kepentingan bersama. Belum lagi para pemodal yang ingin mengembangkan investasi sekaligus melancarkan kapitalisasi. Industrialisasi genap membuat tanah-tanah di desa menyempit. Lahan-lahan kosong telah dikapling sedemikian rupa oleh kaum urban yang bernaflu mengeruk keuntungan hingga wilayah pedalaman. Akibatnya, kaum petani merutuki penderitaan lantaran sawah mereka beralih fungsi menjadi *mall* dan pusat perbelanjaan. Mereka terperosok dalam kubangan pengangguran dan terbelit oleh beban utang. Ketidadaan modal membuat mereka seolah terusir dari tanah kelahiran.

Atas dasar inilah, para kepala desa beserta jajarannya dapat bersinergi dalam upaya mengamankan kekayaan desa. Dewasa ini, status tanah *bondo deso* beserta batas-batasnya tidak bisa lagi didasarkan pada kesaksian sesepuh desa. Mereka tak mungkin mengandalkan ingatan orang-orang tua yang seringkali dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu. Dalam konteks inilah, sertifikat tanah menjadi bukti atas kekayaan desa yang harus senantiasa dijaga. Bagaimanapun, kepemilikan aset merupakan modal terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* di tingkat lokal. (\*)

**Hotline Public Service**

Anda punya masalah terkait pelayanan publik (public service) di kantor pemerintah atau swasta? Sampaikan pertanyaan, keluhan, saran, dan kritik menyangkut layanan umum seperti air bersih PDAM, PLN, dokumen kependudukan & penataan kota kepada Tribun Jateng. Kami akan membantu mencari solusi kepada pihak-pihak yang berkompeten.



Hubungi RINI AMBARWATI di Telp: 024-8455959 atau SMS: 085712341233  
SURAT: Tribun Jateng, Jalan Menteri Supeno No 30, Semarang, Jawa Tengah.  
E-MAIL: [redaksi.tribunjateng@gmail.com](mailto:redaksi.tribunjateng@gmail.com)

